BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Perusahaan

Pajak sebenarnya sudah dikenal pada zaman sebelum kemerdekaan yaitu pada zaman masih berbentuk kerajaan, pada zaman tersebut pajak dikenal dengan nama upeti. Upeti ini pengertiannya sama dengan pajak yaitu penyerahan sebagian kekayaan kepada penguasa/kerajaan dalam rangka menjalankan pemerintahan.

Setelah zaman sudah merdeka banyak para ahli pajak yang memberikan pendapatnya tentang pengertian pajak, berikut ini sebagian dari beberapa ahli pajak bangsa indonesia yang memberikan pendapatnya tentang pengertian pajak, yaitu :

1. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Dalam bukunya "Perpajakan edisi revisi tahun 2000". Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Pengertian pajak menurut Prof. S. I. Djajadiningrat. Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan pada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari Rakyat untuk Negara.

   Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3.2. Tugas dan Fungsi Perusahaan

1. Tugas Pokok

   Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : *2/KMK.01/2001*, tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak adalah: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

   Adapun fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah

   a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpajakan .
   b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dibidang perpajakan.
   d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Perpajakan.
   e. Pelaksanaan administrasi perpajakan.

3.3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

a. **Jawatan Pajak** yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah;

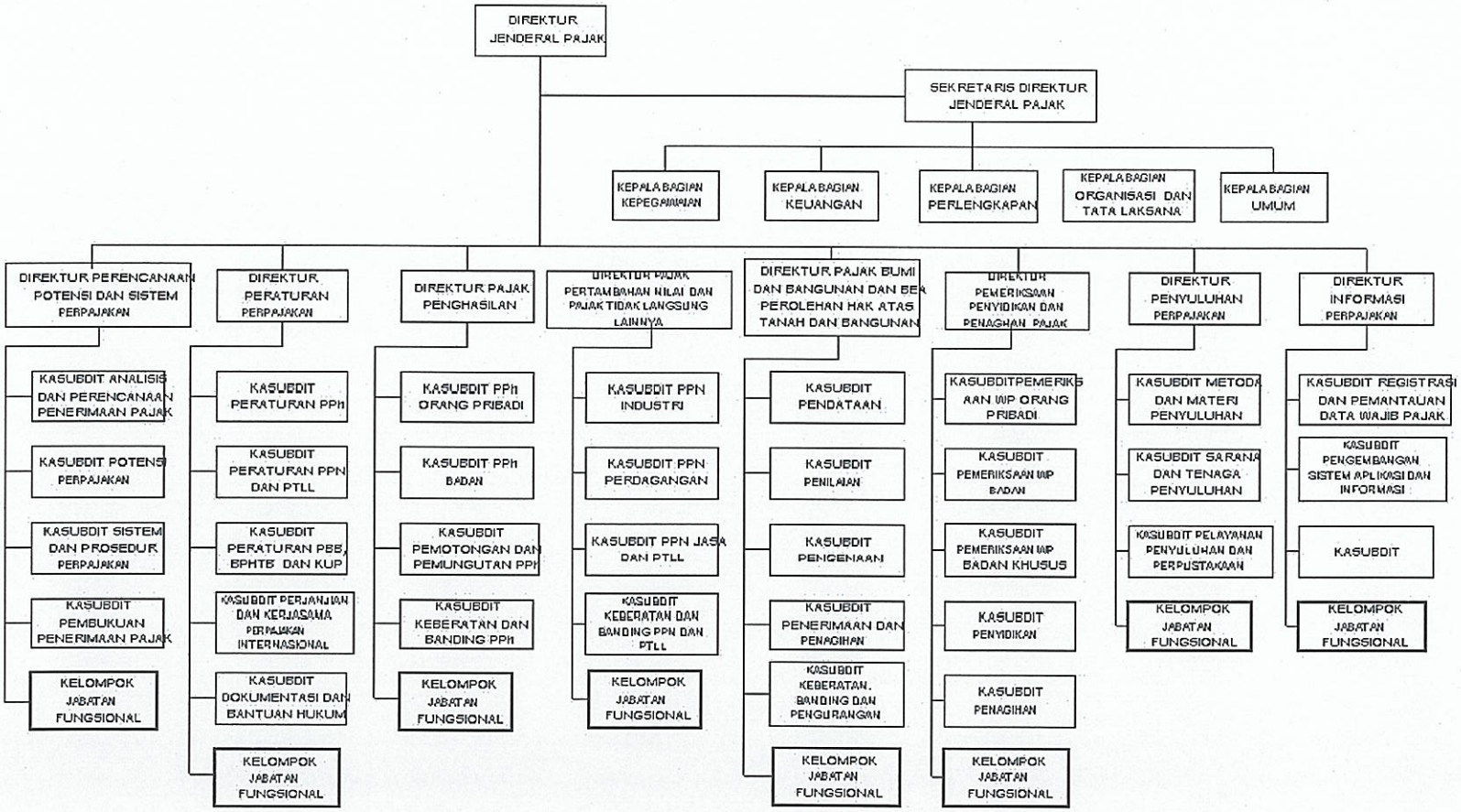
b. **Jawatan Lelang** yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara;

c. **Jawatan Akuntan Pajak** yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

d. **Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter)** yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan keputusan Presiden RI *No. 12 tahun 1976* tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI *No. 12 tahun 1985* Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.



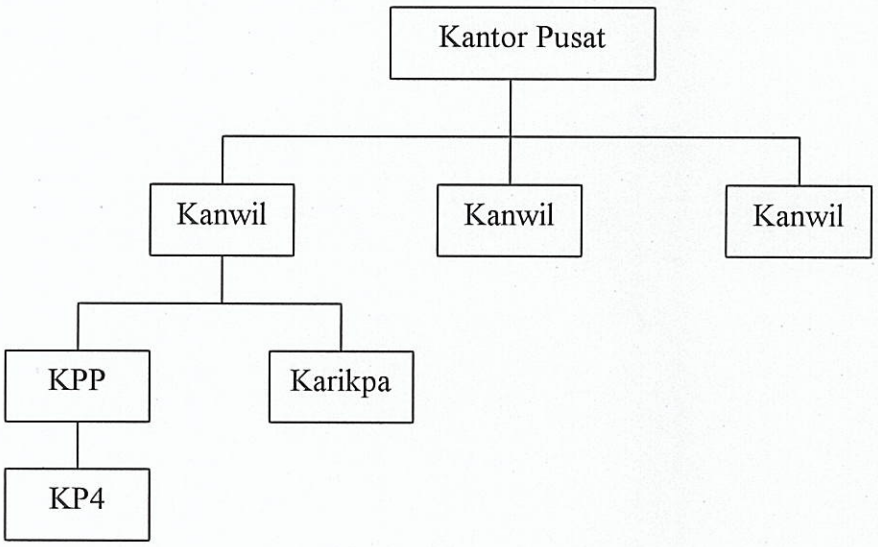
Gambar 3.3.1. Struktur Organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

3.4. Unit Kerja Perusahaan

Unit kerja pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Kantor Pusat
2. Kantor Wilayah
3. KPP
4. Karikpa (Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak)
5. KP4 (Kantor Penyuluhan Dan Penggalian Potensi Pajak)

Struktur unit kerja pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.4.1. Unit Kerja Perusahaan

3.5. Jadwal Kegiatan

Kuliah kerja praktek ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal Pajak yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42-46 Jakarta, Departemen yang bergerak dibidang keuangan negara yaitu mengurusi permasalahan keuangan negara seluruh indonesia.

Berdasarkan kebijakan perusahaan, penulis bersama seorang rekan melaksanakan kerja praktek mulai dari tanggal 01 september 2003 sampai tanggal 30 september 2003. Selain itu pembimbing tidak mewajibkan penulis untuk datang ke perusahaan setiap hari, selama seminggu hanya lima kali masuk (hari senin sampai jum'at) dan jam masuk mulai pukul 07.30 pagi, dan pulang pada pukul 17.00 sore, ini didasarkan pada jam kerja perusahaan.

3.6. Tugas Pokok

Selama kerja praktek yang penulis lakukan adalah :

1. Melakukan Pengamatan secara langsung tentang bagaimana cara merancang/mendesain jaringan LAN (campus LAN).
2. Melakukan wawancara dengan staff karyawan di Direktorat Jenderal Pajak tentang campus LAN yang ada di perusahaan tersebut.
3. Ikut terjun langsung dan sekaligus aktif dalam proses kegiatan di tempat kerja praktek tersebut seperti membantu memonitoring jaringan komputer, mendeteksi dan mencari gangguan/kerusakan jaringan komputer.

3.7. Peralatan yang Digunakan

Campus LAN merupakan perancangan dari LAN itu sendiri dan merupakan sebuah jaringan yang terdiri beberapa segmen dan menggunakan perangkat switch. Adapun komponen tersebut terdiri dari :

a. Client Server
b. Komputer
c. NIC
d. Media transmisi (Twisted Pair, Coaxial)
e. Hub
f. Switch
g. Router
h. NMS (Network Management Server)